



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1825-1834

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23082

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Demokrasi dan Praktik Konservatisme Ormas Keagamaan di Sumatra Barat*

Hairunnas¹, Afrizal², Asrinaldi³

Universitas Andalas Padang



[10.15408/sjsbs.v8i6.23082](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23082)

Abstract

This article discusses the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra. After the implementation of regional autonomy law, various religious organizations appeared en masse with variations in the focus of the movement. The purpose of this study is to look at the practices and factors that cause conservatism by using the concept of religious conservatism as an analytical tool. This research uses qualitative research with a case study approach, data is collected by in-depth interview techniques and collection of documentation. The results of this study indicate that the practice of conservatism religious organizations in West Sumatra places the value of religious teachings on the traditions of the Prophets and Apostles with a rigid spirit of purification of the Qur'an and Sunnah. In practice, religious norms and cultural identities are the main instruments for the formation of morals and political attitudes. In addition, narratives based on religion and customs as ideological elements are considered fixed and final.

Keywords: Religious Conservatism; Religious Organizations; Minangkabau

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat. Pasca diberlakukan undang-undang otonomi daerah, berbagai ormas keagamaan bermunculan secara massif dengan variasi fokus gerakan. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat praktik dan faktor penyebab konservatisme dengan menggunakan konsep konservatisme agama sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik konservatisme ormas keagamaan di Sumatra Barat meletakkan nilai ajaran agama pada tradisi masa Nabi dan Rasul dengan semangat pemurnian kembali kepada Alquran dan Sunnah secara kaku. Dalam praktiknya norma agama dan identitas kultural sebagai instrumen utama pembentukan moral dan sikap politik. Selain itu narasi berbasis keagamaan dan adat sebagai elemen ideologis yang dinilai sudah tetap dan final.

Kata Kunci : Konservatisme Agama; Ormas Keagamaan; Minangkabau.

* Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ **Hairunnas** adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, email: khairunnask69@gmail.com

² **Afrizal** adalah dosen pada Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas Padang, email: afrizalsos@gmail.com

³ **Asrinaldi** adalah dosen pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, email: asrinaldi4@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sarjana politik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang menjalani giliran konservatif, terutama di kalangan populasi muslimnya. Leonard Sebastian dan Andar Nurbowo, misalnya, berargumen bahwa kebangkitan kekuatan Islam konservatif memiliki konsekuensi yang dalam dan luas untuk politik Indonesia dan itu terdiri dari fenomena yang memiliki dampak jangka panjang pada masa depan Indonesia. Gejala kebangkitan Islam konservatif dapat dilihat dari adanya peningkatan level kesalehan dalam praktik Islam di kalangan Jawa Barat, bahkan di antara kelas sosial dan populasi perkotaan yang pada tahun 1955 cenderung memilih nasionalis, dan dua pemilihan terakhir telah membuktikan bahwa Jawa Barat terus menjadi provinsi konservatif di Indonesia.⁴ Pada aspek lain juga ada figur atau lembaga yang memunculkan 'kontra-wacana' yang oleh kalangan Indonesianis lain semacam Martin van Bruinessen, disebut sebagai 'gelombang konservatif' (*conservative tide*).⁵

Sumatra Barat memiliki corak dan karakter yang berbeda dengan daerah lainnya, dengan adanya keselarasan antara nilai budaya dan keagamaan masyarakat yang kemudian dikenal dengan *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam. Agama selalu menjadi sumbernya nilai-nilai tradisional. Agama sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya sebagian dari kehidupan manusia, pandangan konservatif, agama dan moralitas telah dilihat sebagai fondasi yang kokoh untuk perlindungan dari sistem yang ada dan cara hidup normal ketika masyarakat manusia dalam bahaya.⁶ Selain itu Faktor agama dan keyakinan dipandang sebagai elemen ideologis yang tidak terpisahkan dari ideologi neokonservatisme modern, dan berusaha memperkuat posisinya dalam ideologis persaingan dengan menjadikan agama sebagai instrumen utama pembentukan moral politik.⁷

Gejala bangkitnya konservatisme Islam di Sumatra Barat dapat dilihat dari agenda dan kegiatan Ormas keagamaan berbasis lokal yang selama ini aktif dalam memperjuangkan ideologinya. Gerakan kelompok konservatif ini dapat dilihat dari aspek pemikiran keagamaan yang cenderung puritan dengan semangat pemurnian keagamaan sangat dominan yang mewarnai masyarakat Kota Padang dengan jargon 'Kembali kepada al-Quran dan as Sunnah', pola pemikiran yang Salafi-Wahabi, dan bahkan cenderung konservatif.⁸

Adapun faktor menguatnya gelombang konservatisme Islam. *Pertama*, arus konservatisme Islam di Sumatra Barat dimotori oleh kelompok ormas keagamaan berbasis lokal yakni Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI), Front Masyarakat Pembela Islam (FMPI), DDII, HTI, MMI, Libas, Fakta, Paga Nagari, dan MTKAAM juga melakukan aksi sebagai upaya pendesakan pembubaran komunitas Ahmadiyah (okezone.com, 2008). *Kedua*, pada situasi ini, adanya dinamika transnasional Islam di tengah keberadaan dua organisasi

⁴ Lanti, I. G., Ebih, A., & Dermawan, W. (2019). *Examining the growth of Islamic conservatism in Indonesia: The case of West Java*. (RSIS Working Paper, No. 322). Nanyang Technological University, Singapore. Hlm. 19.

⁵ Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam, Explaining the "Conservative Turn"*. ISEAS, Singapura. Hlm. 3.

⁶ Turaev, A. (2020). The Ideology of Neo-Conservatism: The Role Of Socio - Cultural And Religious Factors. *Архив Научных Публикаций JSPI*. Hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, Hlm. 6.

⁸ Muslim, A. A. *Et al.* (2018). *Menjaga Benteng Kebhinekaan Di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS Di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Dan Kota Tomohon*. Maarif Institute, Jakarta. Hlm. 127.

moderat NU dan Muhammadiyah.⁹ *Ketiga*, peran negara yang dominan dalam memberikan ruang bagi kelompok konservatisme Islam di Sumatra Barat sehingga memberikan celah bagi kelompok ini untuk terus mengekspresikan gerakannya. Muslim konservatif cenderung percaya bahwa negara seharusnya memfasilitasi ketaatan dan penegakan hukum Islam di kehidupan sehari-hari, atau setidaknya tidak mengganggu praktiknya, terutama terkait dengan keluarga atau urusan private.¹⁰

Gejala ini dapat dilihat dari adanya penolakan dari Ormas keagamaan terhadap pembangunan Rumah Sakit Siloam, yang berujung kepada pembatalan pembangunan Rumah Sakit Siloam.¹¹ Merujuk pada realita di atas, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap konservatisme Islam di Sumatra Barat dan berdasarkan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik konservatisme agama melalui ormas keagamaan di Sumatra Barat? Dengan tujuan penelitian;

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik konservatisme agama di Sumatra Barat dan;
2. Menjelaskan faktor penyebab praktik konservatisme agama melalui atau oleh organisasi Islam di Sumatra Barat.

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif evaluatif menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah ormas keagamaan. Temuan penelitian dianalisis menggunakan metode etik dan emik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta pengumpulan dokumentasi yang relevan dengan topic penelitian.¹²

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Konservatisme Ormas Keagamaan di Sumatra Barat

Dalam temuan penelitian ini peneliti mendeskripsikan rangkaian dari berbagai peristiwa yang dilakukan ormas Keagamaan di Sumatra Barat. Peristiwa itu di antaranya ialah: kasus pembubaran Ahmadiyah tahun 2008, penolakan pembangunan RS Siloam pada tahun 2014, Penolakan faham komunitas Syiah dan praktik krematorium HBT (Himpunan Bersatu Teguh) di tahun 2017, Penolakan Gerakan Islam Nusantara, Pembatasan Cadar di IAIN Bukittinggi dan Menuntut Presiden Jokowi Mundur pada tahun 2018, serta penolakan SKB 3 Menteri tahun 2021, sebagai rangkaian penolakan oleh ormas keagamaan konservatif di Sumatra Barat. Di Sumatra Barat, FPI dan KPSI cukup aktif menggerakkan *amar ma'ruf dan*

⁹ Kirana, D., & Garadian, E. A. (2020). Religious Trend in Contemporary Indonesia: Conservatism Domination on Social Media. *Studia Islamika*, 27(3). Hlm. 612.

¹⁰ Brenner, S. (2011). Private Moralities In The Public Sphere: Democratization, Islam, And Gender In Indonesia. *American Anthropologist*, 113(3), 478-490. Hlm. 487.

¹¹ Orasi tersebut merupakan lanjutan serangkaian kegiatan penolakan yang terus meluas ke sejumlah daerah di Sumatra Barat. Lalu, aksi penolakan terhadap pembangunan Super Blok Siloam tersebut dilaksanakan oleh Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) Lanjtnah Sumbar di Pusat Kota Payakumbuh (baitulmaqdis.com, 2014).

¹² Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Hlm. 137.

nahi munkar. Menurut AK (Ex FPI Sumatra Barat),¹³ dan AD (KPSI Sumatra Barat), bahwa kehadiran FPI dan KPSI di Sumatra Barat akan menjadi garda terdepan dalam memberantas kemaksiatan, sekaligus sebagai laskar dalam penegak syariat Islam melalui falsafah “*Amar ma’ruf, nahi munkar*”. Berdasarkan hasil wawancara dengan AD mengatakan bahwa Sumatra Barat dari segi kultur merupakan wilayah yang terbebas dari bentuk perbuatan maksiat. Sesuai dengan falsafahnya “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat Sumatra Barat tergolong masyarakat yang agamis, atau masyarakat yang komitmen terhadap ajaran agamanya.¹⁴

Dari kasus Pembangunan RS Siloam misalnya, isu penolakan dikarenakan isu-isu kristenisasi sangat sensitif dan masyarakat Minang sendiri mengalami pengalaman buruk terhadap gerakan kristenisasi yang ada disekitarnya. Penolakan RS Siloam dengan alasan adanya misi terselubung kristenisasi dapat dicari kebenarannya, karena dalam masyarakat Minang sendiri pernah mengalami pengalaman yang traumatik dan reaktif dalam menanggapi berbagai isu kristenisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa agama begitu *inheren* bagi masyarakat sumbar. Menurut GG MUI sebagai sebuah lembaga ormas Islam penting untuk terlibat dalam gerakan penolakan umat Islam, dalam beberapa kasus bahkan MUI merupakan koordinator dari ormas-ormas Islam yang ada di Kota Padang. Penolakan ormas Islam dalam menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam, merupakan isu mendasar dan utama bagi umat Islam di Sumatra Barat. Sehingga Isu tersebut sangat sensitif dan bagi umat Islam.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI pada dasarnya adalah lembaga atau ormas Islam yang memiliki tujuan dan peranan sebagai lembaga mediasi antara kepentingan-kepentingan umat muslim atau aspirasi muslim dengan pemerintah. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah MUI merupakan lembaga yang bersifat penengah dalam memediasi kepentingan-kepentingan umat muslim. Praktik konservatisme agama di Sumatra dapat juga dijumpai melalui peristiwa penolakan Krematorium pada tahun 2017. Penolakan Krematorium ini juga di motori oleh ormas keagamaan yang sama dengan mengatas namakan Forum Masyarakat Minang (FMM) ormas di antaranya ialah KPSI, GNPF MUI, dan MTKAAM dan ormas keagamaan lainnya. Dalam peristiwa penolakan tersebut ormas keagamaan melakukan aksi demonstrasi berdasarkan pemahaman yang meyakini bahwa aktivitas pembakaran mayat tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, sehingga aktivitas krematorium tersebut harus ditiadakan di Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan JFA mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku di Minangkabau jelas melarang pembakaran mayat.¹⁶

Temuan yang sama juga peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan IAG kita yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang bersama ormas lainnya meminta krematorium ditutup secara adat karena hukum adat melarang adanya pembakaran mayat apalagi praktik pembakaran mayat ini berdekatan dengan masjid di sekitar Krematorium.¹⁷ Dari temuan wawancara tersebut ormas keagamaan ini melakukan aksi penolakan berdasarkan ketidaksesuaian dengan keyakinan dan norma yang mereka pahami dan

¹³ Wawancara dengan AK di Jl. Veteran Padang.

¹⁴ Wawancara dengan AD di Surau Sumpur Pasar Gadang Padang.

¹⁵ Wawancara dengan GG di Masjid Nurul Iman Padang.

¹⁶ Wawancara dengan JFA di Masjid Al Hidayah Jalan Karet No 15 Padang.

¹⁷ Wawancara dengan IAG di Surau Sumpur Pasar Gadang Padang.

praktikan. Hal demikian sejalan dengan apa yang nyatakan oleh Makin (2017) bahwa gerakan praktik konservatisme agama lebih dominan dalam memberikan tekanan dan mempropagandakan anti keragaman.¹⁸

Pada tahun yang sama ormas keagamaan ini juga memperlihatkan praktik konservatisme keagamaan melalui aksi penolakan terhadap komunitas Syiah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan GG, ranah Minangkabau ini harus bersih dari penganut Syiah dan ajaran Syiah dalam bentuk apapun tidak boleh ada di ranah minang.¹⁹ Aksi yang dilakukan oleh GG pada saat yang sama menjabat sebagai ketua MUI Sumatra Barat dengan mengatasnamakan deklarasi Serambi Mekah. Dari gerakan deklarasi Serambi Mekah yang dimotori oleh MUI Sumatra Barat dalam poin 3 menggambarkan bahwa MUI sebagai institusi keagamaan di Sumatra Barat menyebarkan praktik keagamaan secara kaffah dan skripturalis kepada masyarakat (Wahid, 2014:382). Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dari GG yang menyatakan bahwa prinsip kita sebagai orang muslim yang taat dan berbudaya minang sudah tentu tidak ada ruang bagi paham seperti Syiah di Ranah Minangkabau.²⁰

Dari peristiwa deklarasi Serambi Mekkah tersebut maka peneliti berkesimpulan bahwa Ormas Keagamaan di Sumatra Barat meletakkan praktik ke-Islaman secara *kaffah* dan melakukan pemaksaan terhadap pemerintah agar menghilangkan komunitas dan paham yang berbeda dengan pemahaman dan praktik yang mereka anut. Sedangkan secara prinsip kearifan lokal yang berlaku tidak dibenarkan bertentangan dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia dengan mengajukan surat kepada Komnas HAM tidak bersifat mengikat dan tidak berlandaskan hukum yang kuat sebagai rujukan karena pada dasarnya pembatasan keyakinan dan keagamaan dapat dibatasi melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya praktik konservatisme agama berhasil dalam melakukan aksinya ketika melakukan pembubaran komunitas Ahmadiyah di Kota Padang hal ini berdasarkan temuan wawancara dengan informan penelitian JFA. Peristiwa pembubaran seluruh aktivitas Ahmadiyah di Kota Padang tersebut merupakan rangkaian agenda KPSI dan Ormas Islam lainnya dalam menolak paham dan keyakinan yang tidak sejalan dengan perintah Alquran dan Sunnah.²¹ Konservatisme agama dikatakan sudah memfasilitasi terbentuknya transformasi otoritas keagamaan ke dalam politik praktis, dan adanya interaksi dan relasi antara agama dan politik yang berpengaruh terhadap berbagai kehidupan sosial masyarakat (Permana, 2020:345). Dengan praktik konservatisme agama ini memungkinkan bagi pemerintah daerah dan para elit politik Sumatra Barat menggunakan isu populis ini untuk kepentingan mayoritas populasi tidak lain untuk mengumpulkan dukungan elektoral. Pada kasus *Mixed used building/ Padang Landmark* pada tahun 2013 dalam kasus ini elit politik kemudian memanfaatkan isu keagamaan sebagai sarana untuk mengamankan kepentingan kelompoknya.

Selanjutnya gerakan advokasi yang dilakukan oleh FMM tidak terlepas dari sosok kharismatik di antaranya Aqil, Irfianda Abidin dan H. Masfar Rasyid dari MUI Sumbar sebagai aktor dalam gerakan penolakan itu. Dari hasil wawancara dengan IAG yang menjadi

¹⁸ Makin, A. (2017). Homogenizing Indonesian Islam: Persecution Of The Shia Group In Yogyakarta. *Studia Islamika*, 24(1), 1-32. Hlm. 30.

¹⁹ Wawancara dengan GG di Masjid Nurul Iman Padang.

²⁰ Wawancara dengan GG di Masjid Nurul Iman Padang.

²¹ Wawancara dengan JFA di Masjid Al Hidayah Jalan Karet No 15 Padang.

salah satu aktor dalam penolakan berdirinya RS Siloam yang memaparkan bahwa pembangunan itu tidak bisa dilepaskan dari isu kristenisasi yang dibawa oleh James T. Riady.²² Dimana James T Riady dalam kasus penolakan RS Siloam yang seorang pengusaha yang dikenal sebagai tokoh kristenisasi tingkat dunia. Lebih lanjut IAG menegaskan bahwa ancaman kristenisasi itu bukan serta merta diungkapkan tanpa alasan. Dirinya menilai berbagai penelitian dan koordinasi dilakukan kurang dari 30 ormas di Sumatra Barat menentang pembangunan RS siloam beserta dengan misi-misi yang dibawa di dalamnya.

Penegakan syariat Islam yang diperjuangkan oleh kelompok Salafi, HT, FPI, dan KPSI adalah merujuk kembali seperti apa yang pernah dilakukan pada zaman Nabi sesuai pada kondisi sosial masyarakat saat itu. Sementara keinginan kelompok ini, menjadikan kondisi hari ini sama seperti zaman Nabi, melihat hal ini tentu merupakan sesuatu yang sulit direalisasikan dengan melihat dinamika sosial kultur masyarakat yang semakin heterogen dan dinamis. Dari temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan GG mengatakan bahwa isu pembangunan Rumah Sakit Siloam itu sudah menjadi keresahan bagi umat muslim Sumatra Barat maka oleh karena itu MUI perlu ambil peran dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat muslim Minangkabau.²³ Selain itu GG juga menekankan bahwa pembangunan Rumah Sakit Siloam itu dapat mengganggu nilai-nilai aqidah, nilai-nilai tauhid orang muslim serta dapat menodai falsafah hidup ABS-SBK masyarakat Minangkabau. Dapat dilihat meskipun aksi itu intrik dengan politik namun tidak dapat dilepaskan dari faktor ormas keagamaan yang meletakkan isu keagamaan melalui pembangunan RS Siloam di Kota Padang.

Dari kasus penolakan RS Siloam melalui proyek pembangunan Padang Landmark tersebut menunjukkan bahwa advokasi FMM yang terdiri dari ormas keagamaan di Sumatra Barat memberikan ruang transformasi otoritas keagamaan yakni MUI sebagai lembaga keagamaan yang pada prinsipnya sebagai media antara pemerintah dengan umat bahkan terbawa arus dalam ranah politik praktis, sehingga isu-isu keagamaan dan kepentingan politik kelompok menjadi satu kesatuan yang berdampak kepada konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Dengan kata lain apa yang dilakukan oleh elit lokal kemudian bersinggungan dengan kepentingan kelompok agama dan elit partai politik berbasis Islam. Sehingga formalisasi gerakan konservatisme agama ini menemukan momentum dalam rangka menjaga stabilitas kepentingan elit politik lokal demi mempertahankan konstituenya.

Praktik politisasi identitas keagamaan ini kemudian juga dapat dijumpai melalui peristiwa penolakan sejumlah ormas di Sumatra Barat menuntut agar Presiden Jokowi Mundur Penolakan ini satu di antara tuntutan adalah penolakan terhadap Islam Nusantara dan menolak adanya kegaduhan yang dinilai dapat mengganggu tatanan norma-budaya masyarakat Minangkabau.²⁴ Hal ini peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan IAD menilai rakyat Minangkabau menolak Islam Nusantara dan aturan penggunaan

²² Wawancara dengan IAG di Surau Sumpur Pasar Gadang Padang.

²³ Wawancara dengan GG di Masjid Nurul Iman Padang, pada saat penolakan RS Siloam, GG menjabat sebagai Ketua Fatwa MUI Sumatra Barat, selain itu GG juga terdaftar sebagai koordinator dalam penolakan Rumah Sakit Siloam.

²⁴ Penyampaian aspirasi mengatas namakan Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) yang di hadiri antara lain Alfandi Khadir (Sekjend MTKAAM Sumbar), Aswin Datuak Rajo Malano (MTKAAM Sumbar), Abu Huda Wal (Ketua Majelis Muahidin Sumbar), Khairul Azmi (FPI Sumbar), Reza Irham (Komite Penegak Syariat Islam), Nurtzali (pengusaha), dan lain sebagainya.

alat pengeras suara di masjid masjid yang ada di Sumatra Barat.²⁵ Selain itu IAD juga mengatakan tidak mau kehidupan adat istiadat Minangkabau diganggu oleh orang-orang luar yang dapat merusak tatanan nilai luhur. Masyarakat Minangkabau sangat menghargai pendatang dari golongan mana pun asalkan mereka tidak membuat kegaduhan di ranah Minang.²⁶

2. Agama dan Identitas Lokal Sebagai Prinsip Mutlak

Konservatisme agama di Sumatra Barat mencirikan tradisi sebagai nadi bagi konservatisme itu sendiri.²⁷ Ormas Keagamaan di Sumatra Barat berpegang pada ketepatan nilai tradisi dan prinsip yang sudah lalu dan tentunya kelangsungan tradisi. Aspek ini diidentifikasi dari semangat Ormas keagamaan Sumatra Barat yang tetap berpegang teguh kepada falsafah ABS-SBK dengan menganggap nilai dan norma yang ada sudah final. Dari temuan penelitian wawancara dengan GG mengatakan bahwa interpretasi agama dan adat merupakan tradisi yang final tidak perlu di ganggu gugat.²⁸ Selain itu relasi antara nilai adat sebagai identitas lokal dan norma agama sebagai landasan menjadi faktor penentuan dalam melakukan setiap aksi yang bernuansa isu keagamaan pada penolakan RS Siloam yang di inisiasi melalui FMM dengan lantang disuarakan oleh aktor lokal sekaligus menjadi ketua lembaga Kerapatan adat alam minangkabau menolak pembangunan RS Siloam.

Alasan penolakan ini adanya kekhawatiran terkait dugaan adanya isu misi kristenisasi dalam proyek pembangunan tersebut.²⁹ Selanjutnya penolakan Syiah di Padang juga di motori oleh kelompok ormas keagamaan yang sama yang juga mengatasnamakan FMM yang terdiri dari 38 ormas lainnya dengan semangat menjaga alam minangkabau dari paham yang tidak sejalan dengan falsafah ABS-SBK di Sumatra Barat.³⁰ Dari temuan penelitian diatas menunjukkan bahwa Falsafah ABS-SBK sebagai rujukan dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat Sumatra barat menjadikan gerakan konservatisme agama yang tak terpisahkan keberadaannya dari budaya Minangkabau.

Dengan demikian relasi yang terbangun sudah lama antara agama dan budaya, pada saat tertentu juga memicu ketegangan dan konflik antara keduanya terutama dalam menghadapi modernitas. Tidak jarang pula falsafah yang dianut sebagai norma bagi masyarakat Minangkabau ini juga menjadikan dirinya komunitas yang cenderung eksklusif dibandingkan dengan komunitas lainnya yang ada di Sumatra Barat. Dari kasus penolakan praktik krematorium dan RS Siloam Falsafah ABS-SBK digaungkan dengan narasi agama dan adat demi kepentingan masyarakat Minangkabau. Tidak dapat dipisahkan narasi ini menjadi media yang efektif bagi ormas konservatisme agama untuk mendahulukan kepentingannya

²⁵ Wawancara dengan IAG di Surau Sumpur Pasar Gadang Padang.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Giddens, A. (2002). *Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives*. Profile Books, London. Hlm. 42.

²⁸ Wawancara dengan GG di Masjid Nurul Iman Padang.

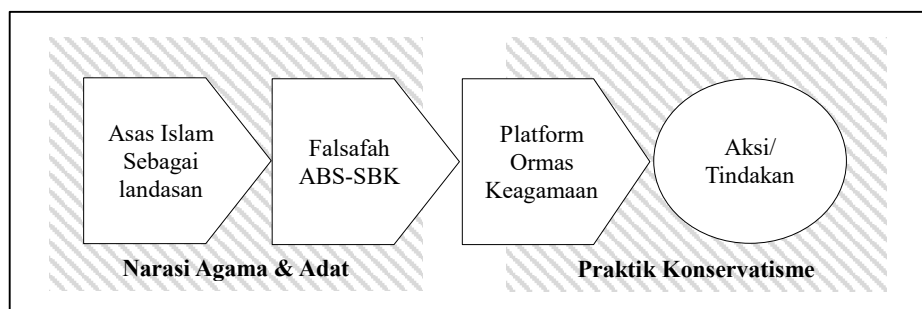
²⁹ Berangkat dari fakta dan data yang telah dikumpulkan, FMM berargumentasi bahwa pembangunan *super block* akan merusak nilai adat dan agama masyarakat Minangkabau yang mayoritas Islam, yang menunjang tinggi nilai Adat Basadi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan akan menjadi permasalahan apabila dibiarkan kaum Nasrani memasuki dan menguasai daerah Sumbar dikhawatirkan akan menodai adat dan agama orang Minang.

³⁰ FMM (Forum Masyarakat Minangkabau) Sumbar yang terdiri dari 48 Ormas di antaranya FMM, KPSI, GNPF MUI, dan MTKAAM

bahkan untuk memicu sentiment agama terhadap kelompok atau komunitas lainnya.

Gambar 1

Kedudukan Konservatisme Ormas Keagamaan di Sumatra Barat



Pada tanggal 7 Januari 2020 misalnya, aparat kepolisian di Sumatera Barat menangkap Sudarto seorang aktivis dari Yayasan Pusaka Padang, sebuah organisasi advokasi hak asasi manusia dan lingkungan dianggap karena melanggar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan menyebarkan informasi dengan maksud menghasut kebencian berdasarkan agama, etnis, ras, dan atau kelas. Dari temuan penelitian Sudarto sempat mengunggah postingan di Facebook yang menyatakan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, telah melarang kebaktian Natal. Berdasarkan laporan media, pada Desember tahun 2019, petugas polisi di Dharmasraya telah memberi tahu masyarakat setempat untuk tidak mengadakan kebaktian Natal di sana dan malah pergi ke gereja di tetangga Kabupaten Sawahlunto, 75 mil dari desa. Sudarto dibebaskan sehari setelah penangkapannya.

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei tahun 2020, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang meminta penghapusan aplikasi bernama "Alkitab dalam bahasa Minangkabau". Gubernur Sumatra Barat itu mengatakan terjemahan alkitab berbahasa Minangkabau membuat masyarakat Minangkabau tidak nyaman karena bertentangan dengan budaya masyarakat. Dalam kasus ini pengembang aplikasi memilih untuk menghapus aplikasi secara sukarela dari Google Play Store agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Sumber menyatakan bahwa tidak ada tanda bahwa aplikasi tersebut mengabaikan kebijakan Google atau bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta pengembang aplikasi untuk menghapus aplikasi tersebut. Penolakan kasus tersebut juga mendapat dukungan dan dorongan penuh dari MUI Sumatra Barat dan ormas keagamaan di Sumatra Barat lainnya, yang menganggap bahwa kasus tersebut dapat memicu terjadinya konflik. Dalam pernyataannya GG menilai orang minang sudah pasti seorang muslim dan jika dia bukan seorang muslim berarti dia bukan termasuk orang Minangkabau. Ini sudah menjadi prinsip orang Minangkabau sejak dahulunya dimanapun orang Minang berada dan sudah terbentuknya perjanjian serta kesepakatan di antaranya.

Berdasarkan masalah di atas menjelaskan narasi sentiment atas nama agama sering kali dilandasi berdasarkan nilai lokal yang di anut masyarakat Minangkabau, tidak jarang intervensi itu bahkan muncul dari pemerintah daerah bahkan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dengan kata lain pemerintah daerah, polisi, dan organisasi keagamaan cenderung berusaha untuk menutup rumah ibadah kelompok minoritas agama dengan alasan pelanggaran izin, seringkali setelah protes dari "kelompok intoleran", bahkan jika

kelompok minoritas telah diberi izin yang tepat. Dalam tataran politik, tidak jarang filosofi ABS-SBK dijadikan sebagai pijakan dalam berbagai rumusan kebijakan di setiap pemerintah daerah itu tercermin dalam visi misi dan program pemerintah daerah yang bernuansa filosofi ABS-SBK. Di setiap gerakan dan aktivitas ormas keagamaan ini selalu menggunakan narasi yang mengarahkan kepada penguatan identitas mereka, dan karena penguasaan terhadap narasi itu kelompok ini mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat terutama dari para tokoh dan elit komunitas keagamaan dan budaya yang ada di Sumatra Barat.

D. KESIMPULAN

Praktik konservatisme agama Ormas Keagamaan di Sumatra Barat dipengaruhi oleh faktor agama, sosial dan budaya sebagai identitas masyarakat Minangkabau. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama lain sehingga memunculkan hubungan ketergantungan yang telah terjalin cukup lama hingga saat ini. Praktik konservatisme agama melalui ormas keagamaan di Sumatra Barat meletakkan Islam dan Falsafah ABS-SBK sebagai landasan di setiap aksi dengan memanfaatkan platform dan wacana keagamaan. Relasi yang terbangun antara ormas keagamaan dengan aktor politik praktis berimplikasi kepada transformasi elit keagamaan ke dalam kepentingan politik demi kepentingan politik electoral dan hak-hak istimewa komunitas mereka. Konservatisme agama ormas keagamaan di Sumatra Barat selalu memberikan respon menentang rezim yang sedang berkuasa pada saat yang sama pemerintah daerah juga cenderung akomodatif terhadap kelompok ini.

Meskipun dari berbagai wacana dan isu yang didominasi oleh ormas keagamaan ini, akan tetapi kelompok ini tidak memiliki jejaring yang banyak. Hal ini disebabkan ormas keagamaan yang dibentuk berdasarkan orang-orang dengan lingkungan yang sama. Meskipun demikian kelompok ormas keagamaan ini selalu menggunakan narasi agama dan adat serta isu keagamaan di Sumatra Barat dengan membawa Islam dan Falsafah ABS-SBK sebagai landasan disetiap aksi mereka. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah sebaiknya lebih menerapkan kebijakan yang multikulturalisme dengan meletakkan kelompok atau komunitas lain sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat Minangkabau, bukan sebaliknya memberikan kesenjangan diatas semangat norma keagamaan serta semangat ABSSBK yang diterapkan cenderung bersifat konservatif. Selanjutnya, pemerintah daerah hendaknya bertindak lebih toleran terhadap kelompok atau komunitas lain dan menjalin hubungan secara berkesinambungan antar kerukunan umat beragama dalam upaya pengelolaan keberagaman komunitas atau keyakinan yang ada di Sumatra Barat.

REFERENCES

- Azra, A. (2016). Kontestasi Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer. *Studia Islamika*, 23(1), 175-184.
- Baitulmaqdis. (2014), Umat Islam Sumatra Barat Sepakat Tolak RS Siloam. (<https://baitulmaqdis.com/our-action/patut-dicontoh-umat-islam-Sumatra-barat-sepakat-tolak-rs-kristen-siloam/>).
- Brenner, S. (2011). Private Moralities In The Public Sphere: Democratization, Islam, And Gender In Indonesia. *American Anthropologist*, 113(3), 478-490.

- Giddens, A. (2002). *Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives*. Profile Books, London.
- Kirana, D., & Garadian, E. A. (2020). Religious Trend in Contemporary Indonesia: Conservatism Domination on Social Media. *Studia Islamika*, 27(3).
- Lanti, I. G., Ebih, A., & Dermawan, W. (2019). *Examining the growth of Islamic conservatism in Indonesia: The case of West Java*. (RSIS Working Paper, No. 322). Nanyang Technological University, Singapore.
- Makin, A. (2017). Homogenizing Indonesian Islam: Persecution Of The Shia Group In Yogyakarta. *Studia Islamika*, 24(1), 1-32.
- Muslim, A. A. Et al. (2018). *Menjaga Benteng Kebhinekaan Di Sekolah: Studi Kebijakan OSIS Di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, Dan Kota Tomohon*. Maarif Institute, Jakarta.
- Okezone. (2008), 9 Ormas Sumbar Desak Presiden Bubarkan Ahmadiyah. (<https://news.okezone.com/read/2008/04/23/1/103226/9-ormas-sumbar-desak-presiden-bubarkan-ahmadiyah>).
- Sebastian, L. C., & Andar Nubowo. (2019). The 'Conservative Turn' in Indonesian Islam: Implications for The 2019 Presidential Elections. *Asie. Visions* 106.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Turaev, A. (2020). The Ideology of Neo-Conservatism: The Role Of Socio-Cultural And Religious Factors. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
- Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam, Explaining the "Conservative Turn"*. ISEAS, Singapura.